

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1.1.1 Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo

Belum terlaksana. Dikarenakan belum ada kepastian hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yang sudah berlaku dan semestinya dilaksanakan sesuai apa yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan tentang kawasan tanpa rokok. selain itu, sampai saat ini banyak yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta pemahaman betapa pentingnya menjaga kesehatan tanpa kehadiran dari rokok atau dengan merokok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terutama Sivitas Akademika, yang diantaranya Dosen dan Mahasiswa, serta Pegawai Tenaga Kependidikan yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, dikarenakan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan maupun pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan ketiadaan larangan maupun penerapan sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam penegakan yang seharusnya di lakukan oleh Lembaga yang diberi tanggung jawab dalam hal pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu Universitas Negeri Gorontalo.

1.1.2 Kendala yang menghambat Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, mengenai kendala SKPD di bidang Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang merupakan Pimpinan atau penanggung jawab. Yang disimpulkan secara keseluruhan melalui 3 (tiga) komponen dalam pembangunan hukum, yang diantaranya, materi (substansi), kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum.¹ Yang diuraikan di bawah ini :

a. Segi struktur

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo dapat dikatakan belum maksimal,

b. Segi substansi

Tidak ada kejelasan pada isi muatan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014, yaitu tipe tempat kerja, syarat tempat kerja dan mana yang merupakan tempat proses belajar mengajar, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dengan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo terkait pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, Penerapan sanksi terhadap larangan merokok

¹ Fence M. Wantu, *Op.cit*, hal 1

tidak terlihat dan tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam menanggapi hal ini. Sehingga larangan merokok hanya sebagai hiasan dinding maupun pintu, yang keberadaannya langka di Universitas Negeri Gorontalo.

c. Segi culture

Tanpa adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo maupun larangan merokok di kampus, akan menimbulkan moral yang kurang berkualitas, dan dapat menurunkan citra dari Universitas Negeri Gorontalo dalam hal daya mutu lingkungan yang tidak sehat dengan adanya kebiasaan dari kelompok maupun oknum mahasiswa, dosen serta pegawai yang menjalankan kegiatan sehari-hari di kampus tanpa memperdulikan kondisi kesehatan dirinya maupun orang lain yang diakibatkan oleh asap rokok.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat diberikan saran antara lain :

1. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih tegas, aktif, dan cekatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat-tempat yang sudah ditetapkan khususnya dalam hal penertiban larangan merokok di tempat proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
2. Lebih diperjelas terkait masalah sanksi, penegakan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Kawasan Tanpa Rokok melalui sosialisasi secara komperhensif untuk dapat meningkatkan peran Civitas Akademika beserta Pegawai tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dalam hal pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok.

3. Dibutuhkan perhatian lebih mendalam bagi Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam hal pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban pimpinan dan/atau penanggung jawab yang memiliki jabatan tertinggi di lingkungannya khususnya di Universitas Negeri Gorontalo terkait dengan aturan larangan merokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika: Palu
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Palu
- Budiono, Abdul, Rachamd. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bayumedia Publishing: Jawa Timur
- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & empiris)*. Pustaka Pelajar, Cetakan Kedua: Yogyakarta
- Hawari, Dadang. 2000. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. FKUI: Jakarta
- Kurnia, Titon, S. Dkk. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, Dan Penelitian Hukum Di Indonesia Sebuah Reorientasi*. Pustaka Pelajar: Salatiga
- Latief Abdul. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. UII Press Jogjakarta: Jogjakarta.
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadan Media Group: Surabaya
- Prakoso, Abintoro. 2014. *Hukum Dan Psikologi Hukum*. Laksbang Grafika, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung
- Sumanto, 2013. *Psikologi Perkembangan: Fungsi dan Teori*. Center of Academic Publishing Service: Yogyakarta
- Tutik, Titik, T. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Cerdas Pustaka Publiir: Jakarta
- Wantu, Fence. 2011. *Idee Des Recht*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Willis, Sofyan, S. 2005. *REMAJA DAN MASALAHNYA Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex, & Pemecahannya*. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Desarancawiru.blogspot.com, *Pengertian Rokok dan Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Manusia.* (Online), <http://desarancawiru.blogspot.com/2014/01/pengertian-rokok-dan-bahaya-merokok.html>, Jawa Tengah

Dilihatya.com, 10 September 2014, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli* (Online), <http://dilihatya.com/1473/pengertian-analisis-menurut-para-ahli>. Wordpress

M. Nashihun Ulwan, Selong, NTB. <http://www.portal-statistik.com/p/saya-ucapkan-terimakasih-kepada-sobat.html> (Online)

<http://kbbi.web.id/analisis> di akses hari Rabu 27 Mei 2015 pukul 02.15 WITA

Id.wikipedia.org, Universitas Negeri Gorontalo (Online), http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Gorontalo

Peraturandaerah.com, Pengertian Peraturan Daerah (Online), <http://peraturandaerah.com/pengertian-peraturan-daerah/>

Tesispendidikan.com, Pengertian Pendidikan Tinggi Menurut Para Ahli (Online), <http://tesispendidikan.com/pengertian-pendidikan-tinggi-menurut-para-ahli/>.

Vinanabilla.blogspot.com, Semarang, Jawa Tengah, 27 Desember 2013,
Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, dan Pelaksanaan Hukum (Online),
<http://vinabilla.blogspot.com/2012/12/penegakan-hukum-kesadaran-hukum-dan.html>

www.ung.ac.id

Hasil wawancara oleh Bpk. Erik selaku Pelayanan Informasi Biro Hukum Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo pada tanggal 13 Oktober 2015 Pukul 11.30 WITA

Hasil wawancara oleh Dr. Irma Cahyani Ranti, selaku tim pengusul dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Pada Tanggal 3 November 2015 Pukul 08.30 WITA.

Hasil wawancara oleh Bpk. Budiyanto Haluti,S.IP, selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, Pada Tanggal 4 November 2015, Pukul 14.30 WITA.

Hasil wawancara oleh Bpk. Helmi Tantu, SH, selaku Kepala Bagian Pelaksanaan Kajian Produk Hukum Daerah yang ada di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae



Andrian Hasan, Lahir pada tanggal 3 Agustus 1993 di Jakarta. Anak pertama dari pasangan suami isteri seiman dan sekeyakinan Bapak Lukman Hasan dan Ibu Nenty Rajagukguk. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 2011 dan selesai pada tahun 2016.

Pendidikan :

- SDN 05 Pagi PWI Jakarta Timur DKI Jakarta Tahun 2005
- SMP Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun 2008
- SMA Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun 2011
- Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016

Pengalaman Organisasi :

- Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Gorontalo Periode 2009 s/d 2010
- Anggota G-AKSI Indonesia

Kegiatan Akademik yang pernah diikuti :

- Peserta Musyawarah 1 Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia Tahun 2015 Di Fakultas Hukum universitas Negeri Gorontalo
- Peserta Sosialisasi 4 Pilar berbangsa dan bernegara MPR-RI 2015
- Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015